pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

ini untuk tujuan komersial tanpa izin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Ambya, D. P. (2023). *Buku Ajar Ekonomi Keuangan Daerah* (Creative Aura Team, Ed.). Aura Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Andirfa Mulia. (2020). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* (Maryana & Rahman Bobby, Ed.). Unimal Press.
- Andriyani, D., & Handayani, W. Sri. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.* 1, 53–63. Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id.
- Fauzan, M., & Rusdiyanti, Defitri. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Alur Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkah Amanah (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu). 8(Issn: 2598-7364).
- Hanifa, R., & Amalia, V. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Oki. 6, 34–48.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(1), 34. <u>Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V4i1.87</u>
- Harahap, L. R., Anggraini, R., & Effendy, R. Y. (2020). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan Pt Eastparc Hotel, Tbk (Masa Awal Pandemi Covid-19). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1). http://Eastparc.Co.Id/Investment/Detail/1,
- Iskandar Jamaluddin. (2019). Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2014-2017. 2460-0585, Volume 6, Nomor 3.

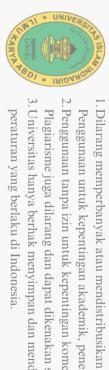
dokumen ini untuk tujuan komersial

pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

tanpa izin tertulis dari

penulis atau

pihak berwenang



- Karmila, S., & Fauzan, M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Manajemen Alokasi Dana Desa Berdasarkan Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Sungai Ara Tahun 2020-2022. *Jurnal Manajemen Keuangan*, *3*, 268.
- Kustia, A. (2019). Analisis Rasio Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). Vol 4 No 3, 129–140.
- Loho, B., Elim, I., & Walandouw, K. S. (2021). *Bab 2 Rasio Keuangan-2*. 9, 1368–1374.
- Lumantow Imanuela Priska, & Karuntu Merlyn. (2022). Analisis Rasio Solvabilitas Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *458 Jurnal Emba*, 10(3), 458–465. Www.Idx.Co.Id.
- Maulana, Agus, Rifa'i, Ahmad, & Widyawati. (2021). *Analisis Model Pengembangan Bumdes*. 7. https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/jam/article
- Maulana, R., Fajar Susanto, B., & Mardatang. (2023). Studi Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 5(2), 390. <u>Https://Doi.Org/10.52362/Jisamar.V5i2.373</u>
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapuraditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskaldan Efektivitas. 13.

pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- Pasha, A. F., Fauzan, M., & Arifin, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Du Pont System Pada Pt Kalbe Farma Tbk Periode 2018 -2022. 9(Issn: 2598-7364).
- Pundissing, R., & Pagiu, C. (2020). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. Paulus Journal Of Accounting, 2(2).
- Purwanti, E., & Noviyanti Elien. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. Jurnal Among Makarti, Vol. 14 *No 2*.
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Owner, 7(2),1831–1840. Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V7i2.1590
- Sahara, A. M., Hermarani, A. D., & Indriaty, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Provinsi Kepulauan Riau Pada Pandemi Covid-19. 5.
- Sari, I., Asaari, M., Sefty, I., & Hidayah, N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019.
- Siregar, L. A. (2021). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Sidimpuan. Universitas Medan Area.
- Utari, R., Nursyabani, A., In, H., Rizka, R. B., Kurniawan, S., & Perpajakan, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dilihat Dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Efektifitas (Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021-2022). Jurnal Eko-Bisma /, 2(2), 204-211.
- Wati Agusnia, T., Putri Anjani, H., Rukmiati, L. I., Fransiska Sinaga, L., Minallah, N., Nirawati, L., Samsudin, Anyar, G., Gn Anyar, K., & Surabaya, K. (2022). Perusahaan. 2484). Manajemen Keuangan Dalam 5(Issn: 2686 Https://Jurnal.Uts.Ac.Id/



Yulistina, Dewi Silvia Dan, & Euis Miftahul. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Dampaknya Terhadap Financial Destress Pada Perusahaan Sektor Logam Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018. 11(2), 1-11.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

.. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.





LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara

> Perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa?
- 2. Apakah proses pembangunan desa merupakan perencanaan yang berkelanjutan ataukah berbeda tiap tahunnya?
- 3. Apakah pemerintah desa/aparatur desa perlu melakukan sosialisasi mengenai dana desa?

Pelaksanaan

- 1. Siapa saja yang berhak dalam melakukan perencanaan penyusunan anggaran dan kegiatan pembangunan desa dan pengelolaannya?
- 2. Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan untuk dana desa, apakah hanya aparatur desa atau bisa juga di luar aparatur desa?
- 3. Dana desa dialokasikan untuk apa saja?
- 4. Apa saja yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan desa?

> Pengawasan

- 1. Bagaimana sistem pengawasan kegiatan penggunaan dana desa?
- 2. Bagaimana pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana desa dan kegiatan pembangunan?
- 3. Apa saja keterlibatan tim pelaksana dalam proses kegiatan penggunaan dana desa?

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

- 1. Siapakah yang bertanggungjawab atas laporan pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana desa, apakah kepala desa atau aparatur desa lainnya?
- 2. Kepada siapa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaporkan?
- 3. Apakah kepala desa bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan yang dilakukan perangkat desa atau tim pelaksana kegiatan?
- 4. Apabila terjadi kasus penyelewengan dana desa, apa yang harus dilakukan?
- 5. Apa yang dimaksud pembiayaan dalam laporan realisasi APBDesa?
- 6. Usaha apa saja yang dimiliki oleh desa?

Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada 2 informan/responden yakni sekretaris, dan bendahara yang merupakan perangkat desa pada lingkungan yang menjadi sasaran penelitian sehingga informasi yang diperoleh benar-benar valid. Berikut beberapa pertanyaan wawancara penelitian:

Perencanaan

- 1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa?
 - Hasil: Penyaluran Dana Desa sudah diatur dari pusat dan di transfer langsung dari pusat melalui rekening desa.
- 2. Apakah proses pembangunan desa merupakan perencanaan yang berkelanjutan ataukah berbeda tiap tahunnya?

hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hasil: Ya proses pembangunam desa berbeda setiap tahunnya, karena setiap tahun ada RKP (Rencana Kerja Kepala Desa satu tahun) contohnya untuk pembangunan di tahun 2025 berrti penyusunan nya dilakukan di tahun 2024 tepatnya pada bulan Juli sampai November, dan itu wajib itu selesai. Kemudian dirumuskan nanti pengajuan dari setiap dusun baru di qada' lagi oleh BPD lalu disetujui yang mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan.

3. Apakah pemerintah desa/aparatur desa perlu melakukan sosialisasi mengenai dana desa?

Hasil: Ya, pemerintah desa melakukan sosialisasi dengan catatan menggunakan baleho tempel.

Pelaksanaan

1. Siapa saja yang berhak dalam melakukan perencanaan penyusunan anggaran dan kegiatan pembangunan desa dan pengelolaannya?

Hasil: Yang berhak melakukan perencanaan adalah orang yang Khusus di kasi perencanaan, tapi kembali lagi perencanaan ini disusun melalui RKP (Rangkuman Kerja satu tahun) dan tertuang di RPJMDes (Rencana kerja kepala desa selama satu periode kerja) jadi setiap tahunnya tinggal mereview saja.

2. Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan untuk dana desa, apakah hanya aparatur desa atau bisa juga di luar aparatur desa?

Hasil: Pelaksana kegiatan harus dari perangkat desa bagian kasi kesejahteran, PK yaitu orang yang bertanggungjawab atas kegiatan yang

hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang

dikelola seperti bahan dan lainnya, dibawah PK ada yang namanya TPK dan itu boleh dari diluar aparatur desa tetapi harus melalui musyawarah.

3. Dana desa dialokasikan untuk apa saja?

Hasil: Dana yang dialokasikan harus sesuai dengan apa yang tertera di APBDes tidak boleh dialokasikan diluar dari itu, apabila ada temuan uang harus kembali, misal pembersihan kanal kemudian meminta uang ke pemerintah desa itu tidak bisa karena tidak termasuk dalam anggaran, Dana desa sudah tertata dan tidak bisa dirubah.

4. Apa saja yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan desa?

Hasil: Penggunaan dana desa sesuai dengan apa yang menjadi prioritas, dikatakan tidak prioritas pada saat musyawarah dan keadaan. Untuk mencari apa yang perlu di prioritaskan perangkatan desa mengumpulkan setiap dusun baru di qada' lagi oleh BPD lalu disetujui yang mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan.

Pengawasan

1. Bagaimana sistem pengawasan kegiatan penggunaan dana desa?

Hasil: Pengawasan dilakukan oleh pendamping P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa), pendamping DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya), Pendamping BUMDes, dan banyak lainya, dan juga BPD yaitu masyarakat.

2. Bagaimana pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana desa dan kegiatan pembangunan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hasil: Pertanggungjawabannya melalui SPJ, sistem keuangan nya sudah terhubung langsung ke inspektorat secara online. Kemudian untuk pekerjaan harus dilaporkan langsung ke bupati melalui camat

3. Apa saja keterlibatan tim pelaksana dalam proses kegiatan penggunaan dana desa?

Hasil : Keterlibatan tim pelaksana dalam proses kegiatan adalah membeli bahan dan membuat laporan ke bendahara kemudian dicairkan

> Pertanggungjawaban

1. Siapakah yang bertanggungjawab atas laporan pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana desa, apakah kepala desa atau aparatur desa lainnya?

Hasil: Kepala desa bertanggungjawab 100% atas laporan keuangan desa

2. Kepada siapa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaporkan?

Hasil : Laporan nya ke Bupati melalui camat, tidak hanya bupati tetapi juga ke dinas PMD

3. Apakah kepala desa bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan yang dilakukan perangkat desa atau tim pelaksana kegiatan?

Hasil: Ya mau tidak mau, makanya selama ini perangkat desa dituntut untuk diserahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan seperti pembangunan jalan tetapi jika terjadi kesalahan yang bertanggungjawab sudah pasti kepala desa. Contohnya di parit selamat ada pembangunan jalan sudah selesai 100% tetapi belum kering dan

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



sudah dilewati, disaat pendamping datang untuk melihat jalan tersebut rusak kemudian mau tidak mau uang tersebut harus dikembalikan ke rekening desa dan menggunakan uang pribadi.

4. Apa yang dimaksud pembiayaan dalam laporan realisasi APBDesa?

Hasil: Pembiayaan adalah sisa belanja atau SILPA

5. Usaha apa saja yang dimiliki oleh desa

Hasil: Desa memiliki 3 usaha, yaitu Galon Atau Depot air minum, Pom Mini, dan Gas LPG. Usaha galon dan Pom Mini berdiri pada tahun 2020 hingga 2021 dan hanya bertahan satu tahun saja, usaha galon memiliki modal awal sebesar Rp 44.140.000 dan pom mini memiliki modal awal sebesar Rp 36.100.000, dan terakhir usaha gas yang berdiri dari tahun 2019 hingga sekarang dengan modal awal Rp 86.700.000.



LAMPIRAN

Dokumentasi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Universitas Islam Indragiri

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
- 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
- 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi

. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

Tembilahan, 01 Juli 2024

Nomor : 141 /UNISI/B/VII/2024

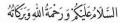
Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Kantor Desa Nusantara Jaya Kec. Keritang

di -

Tempat



Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri (UNISI), dengan nama di bawah ini:

Nama

: Mardiana

Nim

: 101211010036 : VI (Enam)

Semester Program Studi

: Manajemen (S1)

Lokasi Penelitian

: Desa Nusantara Jaya Kec. Keritang

Bermaksud Mengadakan Penelitian dalam Rangka Pengajuan Skripsi Tugas Akhir Dengan Judul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efesiensi" Untuk itu kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian dan permintaan data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرِّكَاتُهُ

Dr. Ahmad Rifa'i, S.E., M



Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen

Penggunaan tanpa izin untuk Penggunaan untuk kepentingan komersial atau pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber ini untuk tujuan komersial hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR **KECAMATAN KERITANG DESA NUSANTARA JAYA**

Jalan Lintas Provinsi KM 2

Kode Pos 29274

SURAT KETERANGAN Nomor: 08 /SK-NTR/III/2025

TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENELITIAN UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dengan Hormat, Menindak lanjuti Surat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Kabupaten Indragiri Hilir. Nomor: 141/UNISI/B/VII/2024 Tanggal 01 Juli 2024. Tentang Permohonan Izin Penelitian dan Pengumpulan data untuk Bahan Skripsi atas nama :

Nama

: MARDIANA

Nim

: 101211010036

Program Studi

: Manajemen (S1)

Lokasi Penelitian

: Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten

Indragiri Hilir

Judul Penelitian

: " Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi "

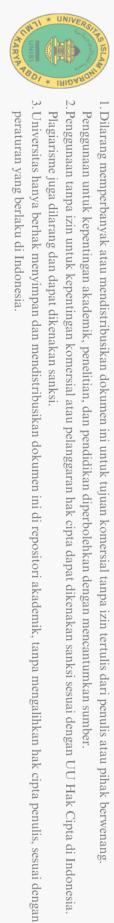
Untuk maksud tersebut, menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas benar melakukan penelitian di DesaNusantara Jaya Kecamatan Keritang Indragiri Hilir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nusantara Jaya, 21 Maret 2025

Nusantara Jaya

AMSUU MU'ARIF,S.Pd NIKD: 19770604092004 1 0069



LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2019

| Ref | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIHJ(KURANG (Rp) |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Asli Desa | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer | 1.534.140.900,00 | 576.425.600,00 | 957.715.300,00 |
| Dana Desa | 826.888.000,00 | 165.377.600,00 | 661.510.400,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 22.172.900,00 | 0,00 | 22.172.900,00 |
| Alokasi Dana Desa | 685.080.000,00 | 411.048.000,00 | 274.032.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.534.890.900,00 | 577.175.600,00 | 957.715.300,00 |
| BELANJA | The same of the | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 515.158.500,00 | 202.795.000,00 | 312.363.500,00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 862.432.900,00 | 286.540.900,00 | 575.892.000,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 172.554.717,00 | 30.250.000,00 | 142.304.717,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 37.421.000,00 | 0,00 | 37.421.000,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 5.172.900,00 | 0,00 | 5.172.900,00 |
| JUMLAH BELANJA | 1.592.740.017,00 | 519.585.900,00 | 1.073.154.117,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (57.849.117,00) | 57.589.700,00 | (115.438.817,00) |
| PEMBIAYAAN | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 57.849.117,00 | 57.849.117,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTC | 57.849.117,00 | 57.849.117,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 115.438.817,00 | (115.438.817,00) |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

NUSANTARAJAYA, 30 Juni 2019

Halaman 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

.. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Universitas Islam Indragiri

Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi



Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR **TAHUN ANGGARAN 2020**

| | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG (Rp) |
|---|------|------------------|-------------------|-------------------------|
| PENDAPATAN | 1.1 | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | 3.280.000,00 | 2.480.000,00 | 800.000,00 |
| Pendapatan Transfer | | 1.634.960.550,00 | 1.634.960.550,00 | 0,0 |
| Dana Desa | | 831.708.000,00 | 831.708.000,00 | 0,0 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 25.566.550,00 | 25.566.550,00 | 0,0 |
| Alokasi Dana Desa | | 692.686.000,00 | 692,686,000,00 | 0,0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,0 |
| Pendapatan Lain-lain | | 61.665.000,00 | 61.665.000,00 | 0,0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.699.905.550,00 | 1.699.105.550,00 | 800.000,0 |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | 681.626.550,00 | 680.159.950,00 | 1.466.600,0 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 386.096.000,00 | 326.455.000,00 | 59.641.000,0 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 114.833.700,00 | 114.833.700,00 | 0,0 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 76.389.317,00 | 76.265.300,00 | 124.017,0 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | 486.000.000,00 | 486.000.000,00 | 0,0 |
| JUMLAH BELANJA | | 1.744.945.567,00 | 1.683.713.950,00 | 61.231.617,0 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (45.040.017,00) | 15.391.600,00 | (60.431.617,00 |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 45.040.017,00 | 0,00 | 45.040.017,0 |
| PEMBIAYAAN NETTC | | 45.040.017,00 | 0,00 | 45.040.017,0 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | 15.391.600,00 | (15.391.600,00 |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

02 February 2021 MATAN KER



Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA NUSANTARA JAYA **KECAMATAN KERITANG** KABUPATEN INDRAGIRI HILIR **TAHUN ANGGARAN 2021**

| PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 2.340.691,00 1.641.380.913,00 848.250.000,00 19.997.913,00 673.133.000,00 100.000.000,00 89.694,00 1.643.811.298,00 | 2.340.691,00 1.636.933.710,00 848.250.000,00 19.997.913,00 668.685.797,00 100.000.000,00 304.694,00 1.639.579.095,00 | 4.447.203,00 0,00 4.447.203,00 0,00 215.000,00 4.232.203,00 |
|---|--|---|--|
| Pendapatan Transfer Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1.641.380.913,00 848.250.000,00 19.997.913,00 673.133.000,00 100.000.000,00 89.694,00 1.643.811.298,00 | 1.636.933.710,00 848.250.000,00 19.997.913,00 668.685.797,00 100.000.000,00 304.694,00 | 215.000,00 4.232.203,00 |
| Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 848.250.000,00 19.997.913,00 673.133.000,00 100.000.000,00 89.694,00 1.643.811.298,00 | 848.250.000,00 19.997.913,00 668.685.797,00 100.000,000,00 304.694,00 1.639.579.095,00 | 0,00 0,00 4.447.203,00 0,00 215.000,00 4.232.203,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 19.997.913,00 673.133.000,00 100.000.000,00 89.694,00 1.643.811.298,00 | 19.997.913,00 668.685.797,00 100.000.000,00 304.694,00 1.639.579.095,00 | 0,00 4.447.203,00 0,00 215.000,00 4.232.203,00 |
| Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 673.133.000,00 100.000.000,00 89.694,00 1.643.811.298,00 | 668.685.797,00 100.000.000,00 304.694,00 1.639.579.095,00 | 4.447.203,00 0,00 215.000,00 4.232.203,00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 100.000.000,00 89.694,00 1.643.811.298,00 | 100.000,000,00 304.694,00 1.639.579,095,00 | 0,00 215.000,00 4.232.203,00 |
| Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 89.694,00 1.643.811.298,00 | 304.694,00 1.639.579.095,00 | 4.232.203,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1.643.811.298,00 | 1.639.579.095,00 | 0.412000 |
| BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 5000 | 0.4500 |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 638.147.715,00 | 739.596.091.00 | 404 440 070 00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 638.147.715,00 | 739.596.091.00 | 404 440 070 00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | 101.448.376,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 345.275.200,00 | 371.617.094,00 | 26.341.894,00 |
| | 151.040.000,00 | 78.547.000,00 | 72.493.000,00 |
| | 109.580.000,00 | 3.630.000,00 | 105.950.000,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 460.800.000,00 | 455.100.000,00 | 5.700.000,00 |
| JUMLAH BELANJA | 1.704.842.915,00 | 1.648.490.185,00 | 56.352.730,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (61.031.617,00) | (8.911.090,00) | (52.120.527,00) |
| PEMBIAYAAN | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 61.031.617,00 | 61.031.617,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTC | 61.031.617,00 | 61.031.617,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 52.120.527,00 | (52.120.527,00) |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



30 Januari 2022

Printed by Siskeudes 21/02/2022 08:38:31

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NUSANTARA JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

| DE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | LEBIHKKURANG |
|--------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| 11 | 2 | 3 | (Rp) | (Rp) |
| 4. | PENDAPATAN | | 7. | 5 |
| 4.1. | Pendapatan Asil Desa | **** | V 1 mm V 1 March | |
| Lit.i. | Hesil Usaha Desa | 500.000,00 | 500,000,00 | 0, |
| 52 | Pendapatan Transfer | 500,000,00 | 500,000,00 | /0, |
| 1.2.1. | Dana Desa | 1.696.701.871,00 | 1.696.701.871,00 | 0, |
| 2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 856.171.000,00 | 856,171,000,00 | 0, |
| 23. | Alokasi Dana Desa | 19.797.871,00 | 19.797.871,00 | 0, |
| .2.4. | Bentuan Keuangan Provinsi | 655,733,000,00 | 655,733,000,00 | 0, |
| 1 | JUMLAH PENDAPATAN | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 0, |
| - | BELANJA | 1.697.201.871,00 | 1.697.201.871,00 | 0,0 |
| 0.00 | | | | |
| 1. | Selanja Pogawai | 470.076.000,00 | 464.376.000,00 | 5.700.000,0 |
| 1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 36.000,000,00 | 36.000.000,00 | 0,0 |
| 1.3. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 366.396.000,00 | 366.696.000,00 | (300.000,0 |
| 1.4. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.880,000,00 | 2.880.000,00 | 0,0 |
| | Tunjangan BPD | 64.800.000,00 | 58.800,000,00 | 6.000,000,0 |
| 2 | Bolanja Barang dan Jasa | 626.278.778,00 | 604.374,489,00 | |
| 2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 146.390.098.00 | 133.824.314,00 | 21.904.289,0 |
| 2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 320.350.000.00 | 316.800,000.00 | 12.565.784,0 |
| 2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 89.430.000,00 | 85.224.175,00 | 3.550.000,0 |
| 2.4. | Belanja Jasa Sewa | 31.193.680,00 | 30.070.000,00 | 4.205,825,0 1.123,680,0 |
| 2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 14.256.000,00 | 14.256.000,00 | 8,0 |
| 2.6. | Belanja Pemeliharaan | 860,000,00 | 800.000.00 | 60.000,0 |
| 2.7. | Belanja Barang dan Jase yang Diserahkan kepada | 23.799,000,00 | 23.400.000,00 | 399.000,0 |
| 3. | Belanja Modal | 300.186.620,00 | 260.085.200,00 | |
| 3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali | 102.856,420,00 | 101.841.000,00 | 40.101.420,0 |
| 3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 176.264.200,00 | 137.178.200,00 | 1.015,420,0 |
| 1.9. | Belanja Modal Lainnya | 21.066,000.00 | 21.066.000,00 | 39,086,000,0 |
| 6 | Belanja Tidak Terduga | 352.800.000.00 | | 0,0 |
| 1.12 | Belanja Tidak Terduga | 352.800,000,00 | 352,800,000,00 | 0,0 |
| | JUMLAH BELANJA | 1.749.341.398.00 | 352.800 000,00 | 0,01 |
| | | | 1.681.635.689,00 | 67.705.709.00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (52.139.527,00) | 15.566.182,00 | (67.705.709,00) |
| F | PEMBIAYAAN | | | |
| | Penerimaan Pembiayaan | 52.139.527,00 | 52.139.527,00 | 0.00 |
| 1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 52.139.527,00 | 52.139.527,00 | 0.00 |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 52.139.527.00 | 52.139.527,00 | 0,00 |

d by Siskeudes 01/04/2023 21.59.51

Halaman 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2023

| URAIAN | Ref. | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
|---|------|------------------|------------------|-----------------|
| PENDAPATAN | 7 | 00,000,000 | 800.000,00 | 0,00 |
| Pencaputan Asil Desa | | 1,956,354,620,00 | 1.936.141.120,00 | 20.213.500,00 |
| Pendapatan Transfer | | 956,404,000,00 | 956.404.000,00 | 0,00 |
| Dária Desa | | 24.010.020.00 | 24.010.020,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 753.940.600,00 | 753.940.600,00 | 0,00 |
| Alokasi Lana Desa | | 172,000,000,00 | 151,786,500,00 | 20,213,500,00 |
| Bentuan Keuangan Provinsi | | 50.000.000,00 | 50,000,000,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | 3.175.801,00 | 3,175,801,00 | 0,00 |
| Pendepetan Lain-lain | | 1.960.330.421,00 | 1,940,116,921,00 | 20,213,500,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.960.330,421,00 | 1.540.110.04.100 | |
| BELANJA | | | 842,285,999,00 | 24,283,206,00 |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | 868,569,205,00 | 842.260.000,00 | |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 411,434,000,00 | 364.645.500,00 | 46.788.500,00 |
| | | 225.712.100,00 | 191,977,100,00 | 33.735,000,00 |
| BIDAND PEUBNIAN KENASYARAKATAN | | 350.401.000.00 | 293.520.800,00 | 56.880.200,00 |
| EDANG PEHBERDAYAAN MASYARAKAT | | 555,7511503,75 | | 100 |
| BOANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN | | 151.200.000,00 | 151,200,000,00 | 0,00 |
| JUNILAH BELANJA | | 2,005,316,305,00 | 1.843.629.399,00 | 161.686,906,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (44.985.884,00) | 96,487,522,00 | (141,473,406,00 |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembisyaan | | 67.705.709,00 | 67.705.709,00 | 0,0 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | 22.719.825,00 | 2,719,825,00 | 20,000.000,0 |
| PEMBIAYAAN NETTC | | 44.985.884,00 | 64.985.884,00 | (20.000.000,00 |
| SEPAISEPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | 161.473.406,00 | (161,473,406,00 |

tan Atas Laporan Keuangan yang merupakan begian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

LEBIHI(KURANG)

REALISASI

ANGGARAN

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Universitas Islam Indragiri

Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.



peraturan yang berlaku di Indonesia Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

BIODATA SINGKAT PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mardiana

Tempat Tanggal Lahir: Nusantara Jaya, 13 Agustus 2002

Jenis Kelamin Perempuan

Status Mahasiswi

Jl. Mboya Lr. Letda Samidi, No.6 Alamat

WNI Kewarganegaraan

Agama Islam

Nomor Handphone 0822-8711-3846

Email mardianam834@gmail.com

Pendidikan:

- 1. MI Nurul Huda
- 2. MTS Nurul Huda
- 3. SMA Negeri 1 Keritang
- 4. Pendidikan Sarjana Universitas Islam Indragiri

Pengalaman Organisasi:

- 1. Dewan Perwakilan Mahasiswa
- 2. Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Keritang
- 3. Palang Merah Remaja
- 4. Pramuka
- 5. Osis

Hormat Saya,

Mardiana

Nim: 101211010036

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang